

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa pelaksanaan Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada BRSDM belum berjalan secara maksimal karena sebagian besar perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan tidak masuk dalam daftar perencanaan kebutuhan perjalanan dinas luar negeri. Padahal setiap akhir tahun sebelumnya, Sekretariat BRSDM sebenarnya telah membuat surat dinas bagi seluruh kepala UPT untuk dapat menyampaikan usulan perjalanan dinas luar negeri untuk tahun berikutnya.

Sekretariat BRSDM belum memiliki formulasi untuk menentukan apakah pejabat/pegawai yang diusulkan sudah sesuai dengan kompetensi dan tusinya masing-masing. Adapun kesimpulan secara terperinci untuk masing-masing aspek dapat dikemukakan sebagai berikut.

#### **1. Aspek Perencanaan**

Pada aspek perencanaan, dimulai dari waktu pelaksanaan, nama kegiatan, jumlah delegasi, kota/negara tujuan, dan pembiayaan dapat dianalisis bahwa, perencanaan perjalanan dinas luar negeri belum sesuai dengan aspek perencanaan dengan sebagian besar belum menyampaikan informasi usulan rencana perjalanan dinas luar negeri tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun demikian untuk penyampaian kelengkapan dokumen perjalanan dinas luar negeri sudah cukup lengkap dan dapat diproses lebih lanjut tanpa kendala. Maka dapat disimpulkan bahwa pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM dari aspek perencanaan menunjukkan bahwa belum memenuhi perencanaan yang baik.

## 2. Aspek Jenis dan Persyaratan

Pada aspek jenis dan persyaratan, bahwa jenis perjalanan dinas luar negeri, sebagian besar belum memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dipersyaratkan. Namun demikian Sekretariat BRSDM tetap dapat memberikan pelayanan pengurusan perjalanan dinas luar negeri kepada semua pejabat/pelaksana di lingkup BRSDM dengan tetap memperhatikan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam perjalanan dinas luar negeri dengan persetujuan Pimpinan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas luar negeri dilihat dari aspek jenis dan syarat belum berjalan maksimal.

### 3. Aspek Mekanisme

Pada aspek mekanisme, menunjukkan bahwa mekanisme perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM belum maksimal. Penyampaian usulan rencana perjalanan dinas luar negeri yang belum dilakukan mengakibatkan proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri menjadi tergesa-gesa karena faktor waktu pengurusan yang kurang memadai. Namun demikian dalam hal terjadi perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM, telah dilakukan penanganan yang tepat dengan segera mungkin membuat surat pemberitahuan terjadi perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri. Pada tahun 2019, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM belum berjalan secara maksimal dikarenakan baru sekitar 69 dari 144 (sebesar 50%) pelaksana perjalanan dinas yang telah menyerahkan laporan perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala BRSDM.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, peneliti dapat menyampaikan saran-saran pada BRSDM sebagai berikut :

## 1. Aspek Perencanaan

Sekretariat BRSDM harus membuat perencanaan perjalanan dinas luar negeri yang baik dengan menunjuk Subkoordinator Kerja Sama dan Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Pegawai guna mencari formulasi yang tepat untuk menentukan apakah usulan perjalanan dinas luar negeri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perjalanan dinas luar negeri. Sekretariat BRSDM perlu menunjuk operator khusus yang menangani perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM dengan membuat surat keputusan penunjukan operator khusus yang menangani perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM.

## 2. Aspek Jenis dan Syarat,

Sekretariat BRSDM harus membuat peraturan tertulis yang mengatur tentang kriteria jenis perjalanan dan syarat yang diperlukan agar perjalanan dinas luar negeri berjalan selektif. Sekretariat BRSDM juga harus tegas untuk mempertimbangkan kembali serta tidak memproses lebih lanjut setiap pengusulan perjalanan dinas luar negeri dari UPT yang tidak menyampaikan usulan rencana perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat BRSDM di tahun sebelumnya. Sekretariat BRSDM juga harus menyiapkan aturan khusus untuk memastikan bahwa pelaksana

perjalanan dinas merupakan orang yang tepat sesuai dengan kompetensinya.

### 3. Aspek Mekanisme

Sekretariat BRSDM harus tegas dengan tidak memproses lebih lanjut pengusulan perjalanan dinas luar negeri dari UPT yang tidak mengirimkan usulan rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun sebelumnya. Sekretariat BRSDM juga harus berani memberikan sanksi tegas bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala BRSDM sesuai peraturan kedisiplinan yang berlaku.

Selanjutnya, Sekretariat BRSDM juga harus melaksanakan kegiatan evaluasi perjalanan dinas luar negeri lingkup BRSDM setiap semester tahun berjalan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan memberikan masukan bagi Kepala BRSDM untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

- Adri, Ara Fa (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Yang Terintegrasi. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang
- Afandi, P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
- Cooper and Schindler. (2014). *Bussines Research Method*. New York: Mc Graw- Hill
- Fahmi, I. (2015). Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T. Hani. (2012). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempat belas, Jakarta: Bumi Aksara
- Jeremi, I. & Setyaningrum, D. (2020). Analisis pola penyelewengan beban perjalanan dinas pada kementerian di indonesia tahun 2015-2017. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 255-272
- Kamaluddin, Apiaty. (2017). Administrasi Bisnis. Makassar: CV Sah Media
- Liyana Wati, Noer dan Selfiana, (2016), Menagani Perjalanan Dinas dalam Negeri Pimpinan *Branch Human Resources Manager* PT Indofood *Consumer Branded Product* Sukses Makmur, Tbk. Cibitung: P2M ASM Bina Insani
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Nawawi, Hadari. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada *University Press*

Nitisemito, Alex S. (2012). Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar. Jakarta: Arena Ilmu

Tomisa, Muhamad Elsa, Nadrah (2019). Pengaruh Perintah Perjalanan Dinas Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2019, Vol.8, No.2: 237-249

Rachmawati, S., Retnasari, T., & Sunarto, S. (2018). Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan. JURNAL TEKNOLOGI DAN ILMU KOMPUTER PRIMA (JUTIKOMP), 1(2), 241-249

Sedianingsih, (2010). Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

STIA LAN Jakarta. (2017). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Sarjana Terapan. Jakarta.

Sadono, Sukirno. (2010). Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Fatimah Zahrah Br, (2016). *Research Law Journal* Vol 11, No 2. Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan. Universitas Negeri Semarang.

## **B. Dokumen**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2017 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri

Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/PER-BRSDM/2021 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021-2024 Sebagai Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021-2024

### **C. Website**

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190826/10/1141052/defisit-apbn-hingga-juli-2019-melebar-ini-penyebabnya>.

<https://kkp.go.id/brsdm>

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**